



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA**

## **DINAS KELAUTAN & PERIKANAN**

**KABUPATEN MUNA BARAT**

**TAHUN 2024**



**LAWORO, NOVEMBER 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman yang memandu gerak langkah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam berkontribusi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Adanya perubahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan kebijakan. Untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di perubahan anggaran Tahun 2024

Sesungguhnya Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja SKPD ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah untuk perwujudan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan professional.

*Tim Penyusun*



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                      | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                          | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                        | <b>iii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                   | <b>1</b>   |
| 1.1. LATAR BELAKANG .....                                                        | 1          |
| 1.2. LANDASAN HUKUM .....                                                        | 3          |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                     | 5          |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                 | 5          |
| <b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN<br/>BERKENAAN .....</b> | <b>7</b>   |
| 2.1. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                          | 7          |
| 2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI<br>SKPD .....              | 15         |
| 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI<br>SKPD .....              | 14         |
| 2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN<br>MASYARAKAT .....                  | 22         |
| <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT<br/>DAERAH .....</b>            | <b>25</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                      | <b>35</b>  |

## **DAFTAR TABEL**

| <i>No</i>  | <i>T e k s</i>                                                                                                                           | <i>Nomor</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tabel 2.1  | Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....                                               | 8            |
| Tabel 2.2. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Kabupaten Muna Barat .....                | 16           |
| Tabel 2.3. | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku<br>Kepentingan pada MUSRENBANG Tingkat<br>Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Muna Barat ..... | 23           |
| Tabel 3.1  | Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas<br>Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada<br>Renja Perubahan Tahun 2024.....   | 25           |

## **PENDAHULUAN**

---

*Bab ini menguraikan Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan*

---

### **1.1. LATAR BELAKANG**

---

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2024, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026 dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 351 mengamanatkan Kepala daerah wajib menyusun dan menyempurnakan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah (Perubahan Renja PD) dengan berpedoman pada rancangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (Perubahan RKPD). RKPD dapat

## **PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

---

diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, OPD dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan dan pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD. Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan seperti perubahan asumsi mikro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka perlu dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 telah melaksanakan program kegiatan prioritas untuk mendukung target pembangunan pemerintah daerah maupun target rencana kerja DKP Tahun 2024 melalui kegiatan yang nyata dalam mendukung pembangunan khususnya bidang kelautan dan perikanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu adanya pengurangan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024 oleh karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran. Maka perlu disusun Perubahan Renja DKP Tahun 2024 ini yang digunakan sebagai dasar dan bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan perubahan yang akan dilakukan

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

---

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

---

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

## PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

---

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
26. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

---

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024 dengan harapan dapat mendorong partisipasi bagi seluruh *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran operasional Rencana Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan dalam menentukan arah dan acuan pelaksanaan kerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2024.
3. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

---

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

---

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN BERKENAAN**

- 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB IV. PENUTUP**

## **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

---

**Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II**

---

### **2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

---

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dasar hukum keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Secara rinci capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sampai dengan  
Triwulan II Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja Utama                                  | Target Renstra<br>Perangkat Daerah<br>Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 |             | Proyeksi Tahun 2024 |             | Catatan<br>Analisis |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
|    |                                                          |                                                  | Triwulan I           | Triwulan II | Triwulan I          | Triwulan II |                     |
| 1  | Persentase Peningkatan<br>Produksi Perikanan<br>Tangkap  | 5%                                               | 1,10%                | 1,14%       | 1,25%               | 1,25%       | Tidak<br>Tercapai   |
| 2  | Persentase Peningkatan<br>Produksi Perikanan<br>Budidaya | 5%                                               | 0,23%                | 0,46%       | 1,25%               | 1,25%       | Tidak<br>Tercapai   |

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian SKPD sampai dengan tahun 2024, dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang direncanakan dalam peraturan bupati yang dilaksanakan SKPD (dinas kelautan dan perikanan) realisasi kegiatannya dapat terpenuhi. Keterbatasan sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya target capaian kegiatan SKPD, baik secara internal maupun eksternal (SKPD terkait).

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

| No  | Program Kegiatan Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target Kinerja   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               | Keuangan             |                              |                      |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
|     |                                                                               |                                                                                                                    |                  |                                 |               | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp) pada Triwulan |                      | %             |
|     |                                                                               |                                                                                                                    |                  | I                               | II            |                      | I                            | II                   |               |
| (1) | (2)                                                                           | (3)                                                                                                                | (4)              | (5)                             |               | (6)                  | (7)                          | (8)                  | (9)           |
| A   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                           | <b>% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>                                     | <b>100 %</b>     |                                 |               | <b>3.204.222.083</b> | <b>581.106.796</b>           | <b>1.305.045.906</b> | <b>58,86%</b> |
| 1   | <b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>             | Nilai AKIP                                                                                                         | <b>B</b>         |                                 |               | <b>22.660.000</b>    | <b>1.450.000</b>             | <b>5.950.000</b>     | <b>32,66%</b> |
|     | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 dok            |                                 |               | 4.800.000            |                              |                      | 0,00%         |
|     | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 1 Laporan        |                                 |               | 17.860.000           | 1.450.000                    | 5.950.000            | 41,43%        |
| 2   | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah Laporan Keuangan OPD yang tersedia</b>                                                                   | <b>1 Laporan</b> |                                 |               | <b>2.552.061.086</b> | <b>450.183.568</b>           | <b>1.138.056.256</b> | <b>62,23%</b> |
|     | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 24 orang/Bulan   | 6 orang/bulan                   | 6 orang/bulan | 2.551.611.086        | 450.183.568                  | 1.138.056.256        | 62,24%        |
|     | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 dok            |                                 |               | 225.000              |                              | -                    | 0,00%         |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan        |                                 |               | 225.000              |                              | -                    | 0,00%         |
| 3   | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                                            | <b>1 Dok</b>     |                                 |               | <b>450.000</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |                                                                            |                                                                                                            |              |  |  |                    |                   |                    |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 laporan    |  |  | 150.000            |                   | -                  | 0,00%         |
|   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1 laporan    |  |  | 150.000            |                   | -                  | 0,00%         |
|   | - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 Laporan    |  |  | 150.000            |                   | -                  | 0,00%         |
| 4 | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik</b>                                             | <b>1 Dok</b> |  |  | <b>525.000</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>0,00%</b>  |
|   | - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1 dok        |  |  | 525.000            |                   | -                  | 0,00%         |
| 5 | <b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>1 dok</b> |  |  | <b>10.000.000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>0,00%</b>  |
|   | - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                 |                                                                                                            | 1 dok        |  |  | 10.000.000         |                   |                    | 0,00%         |
| 6 | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>1 Dok</b> |  |  | <b>415.533.000</b> | <b>98.094.228</b> | <b>120.170.650</b> | <b>52,53%</b> |
|   | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 paket      |  |  | 1.999.000          |                   | 1.075.000          | 53,78%        |
|   | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                               | 1 dok        |  |  | 16.920.000         | 3.000.000         | 7.480.000          | 61,94%        |
|   | - Penyediaan Bahan/Material                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                | 1 paket      |  |  | 23.000.000         | 3.615.000         | 6.790.000          | 45,24%        |
|   | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        | 1 Laporan    |  |  | 373.614.000        | 91.479.228        | 104.825.650        | 52,54%        |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |           |        |        |               |            |            |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|------------|------------|--------|
| 7 | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                     | <b>Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah yang tersedia</b>                                                                                                     | 1 dok     |        |        | 121.999.997   | 19.820.000 | 20.374.000 | 32,95% |
|   | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                       | 1 Laporan |        |        | 7.999.997     | 820.000    | 1.374.000  | 27,43% |
|   | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                         | 1 Laporan |        |        | 114.000.000   | 19.000.000 | 19.000.000 | 33,33% |
| 8 | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    | <b>Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</b>                                                                                                                         | 1 dok     |        |        | 80.993.000    | 11.559.000 | 20.495.000 | 39,58% |
|   | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                       | 18 unit   | 3 unit | 5 unit | 68.993.000    | 10.804.000 | 18.250.000 | 42,11% |
|   | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                           | 10 unit   | 2 unit | 3 unit | 5.000.000     | 755.000    | 2.245.000  | 60,00% |
|   | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                               | 1 unit    |        |        | 5.000.000     |            |            | 0,00%  |
|   | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                     | 1 unit    |        |        | 2.000.000     |            |            | 0,00%  |
| B | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                             | <b>% peningkatan produksi perikanan tangkap</b>                                                                                                                                              | 5 %       |        |        | 3.225.497.518 | 1.350.000  | 3.000.000  | 0,13%  |
| 1 | <b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia</b> | 1 dok     |        |        | 15.000.000    | 1.350.000  | 3.000.000  | 29,00% |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |                                                                                          |                                                                                                      |     |       |  |  |               |           |           |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|---------------|-----------|-----------|--------|
|   | - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                         | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1   | dok   |  |  | 15.000.000    | 1.350.000 | 3.000.000 | 29,00% |
| 2 | <b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia</b>           | 1   | dok   |  |  | 3.210.497.518 | -         | -         | 0,00%  |
|   | - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                   | Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya                                                     | 60  | orang |  |  | 3.194.497.518 |           |           | 0,00%  |
|   | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil             | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya          | 4   | klp   |  |  | 16.000.000    |           |           | 0,00%  |
| C | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                            | <b>% peningkatan produksi perikanan budidaya</b>                                                     | 5   | %     |  |  | 1.583.384.207 | -         | 3.000.000 | 0,19%  |
| 1 | <b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                           | <b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang tersedia</b>                                   | 1   | dok   |  |  | 1.583.384.207 | -         | 3.000.000 | 0,19%  |
|   | - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | 1   | dok   |  |  | 6.000.000     |           | 1.500.000 | 25,00% |
|   | - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                             | 3   | unit  |  |  | 418.484.700   |           |           | 0,00%  |
|   | - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | 8   | unit  |  |  | 1.148.899.507 |           |           | 0,00%  |
|   | - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                   | Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat              | 30  | orang |  |  | 10.000.000    |           | 1.500.000 | 15,00% |
| D | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                              | <b>persentase usaha perikanan yang sesuai aturan</b>                                                 | 100 | %     |  |  | 4.000.000     | -         | -         | 0,00%  |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |   |     |  |  |             |           |            |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|-------------|-----------|------------|--------|
| 1 | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya                                                                | 1 | Dok |  |  | 4.000.000   | -         | -          | 0,00%  |
|   | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota             | 1 | dok |  |  | 2.000.000   |           |            | 0,00%  |
|   | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 | Dok |  |  | 2.000.000   |           |            | 0,00%  |
| E | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                         | <b>% peningkatan produksi olahan hasil perikanan</b>                                                                                                                                 | 3 | %   |  |  | 394.000.000 | 1.500.000 | 14.000.000 | 3,93%  |
| 1 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil                                                              | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang tersedia                                                                          | 1 | dok |  |  | 15.000.000  | 1.500.000 | -          | 10,00% |
|   | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                          | 1 | dok |  |  | 15.000.000  | 1.500.000 |            | 10,00% |
| 2 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                  | Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang tersedia                                                   | 1 | dok |  |  | 26.500.000  | -         | 14.000.000 | 52,83% |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |   |              |  |               |             |               |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|---------------|-------------|---------------|--------|
|   | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 4 | unit usaha   |  | 26.500.000    |             | 14.000.000    | 52,83% |
| 3 | <b>Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>    | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang tersedia</b>                                                                                                                                        | 1 | dok          |  | 352.500.000   | -           | -             | 0,00%  |
|   | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                               | 2 | pelaku usaha |  | 352.500.000   |             |               | 0,00%  |
|   | <b>Jumlah Anggaran</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |   |              |  | 8.411.103.808 | 583.956.796 | 1.325.045.906 | 22,70% |

## **2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

---

Secara umum permasalahan yang ada di lingkup kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Salah satu modal utama pengembangan bidang kelautan dan perikanan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, takwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat kerja yang tinggi melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kelautan dan perikanan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan pengembangan SDM, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam perkembangannya kedepan, SDM harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Secara internal permasalahan yang terkait dengan kualitas Sumberdaya Manusia di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat (aparatur SKPD, nelayan, pembudidaya ikan dan pengelolah hasil perikanan) meliputi :

- Sarana dan prasarana perkantoran masih sangat-sangat terbatas;
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sangat kurang.
- Tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan relatif masih rendah;
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal.

Dengan segala keterbatasan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam artian SDM yang memiliki unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku dan motivasi sesuai dengan pekerjaannya dan jenjang jabatannya.

Permasalahan lain yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Muna Barat yang meliputi :

- Produktivitas perairan mengalami penurunan akibat degradasi habitat dan ekosistem;
- Produktivitas nelayan hingga saat ini masih rendah;

## PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

- Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal;
- Praktek penangkapan ikan yang *destruktive* yang masih terus berlangsung;
- Konflik pemanfaatan sumberdaya masih sering terjadi;
- Infrastruktur penunjang pada sentra-sentra produksi (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) belum optimal;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

| Aspek Kajian                                                                               | Capaian/<br>Kondisi<br>Saat Ini | Standar Yang<br>Digunakan                                                                                | Faktor Yang Mempengaruhi                                                                     |                                                                                                                             | Permasalahan Pelayanan<br>SKPD                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                 |                                                                                                          | Internal<br>(Kewenangan SKPD )                                                               | Eksternal<br>(Diluar Kewenangan<br>SKPD                                                                                     |                                                                                                                                                         |
| (1)                                                                                        | (2)                             | (3)                                                                                                      | (4)                                                                                          | (5)                                                                                                                         | (6)                                                                                                                                                     |
| 1. Pelayanan Administrasi SKPD                                                             | Rendah                          | Administrasi, sarana dan prasarana kantor                                                                | Peningkatan kualitas Pendidikan PNS                                                          | Koordinasi lintas sektoral                                                                                                  | Terbatasnya sarana dan prasarana kantor                                                                                                                 |
| 2. Pendidikan nelayan                                                                      | Rendah                          | Tingkat pendidikan formal nelayan                                                                        | Koordinasi lintas sektor dengan dinas pendidikan                                             | Kebijakan pemerintah pusat & Pemda pada sektor pendidikan                                                                   | Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kemampuan untuk mengembangkan diri masih terbatas.                                                           |
| 3. Aparatur Pengawas Perikanan (PPNS)                                                      | Tidak Ada                       | Rasio luas perairan dengan jumlah pengawas perikanan                                                     | Pembinaan pegawai yang disiapkan untuk menjadi PPNS perikanan                                | Dukungan pelatihan dari Kementerian kelautan dan Perikanan                                                                  | Aparat Bidang Pengawasan hanya 2 orang serta Sarana Pengawasan yang tidak ada                                                                           |
| 4. Sumberdaya perairan                                                                     | Degradasi                       | Jumlah hasil tangkapan berkurang, Wilayah pengkapan semakin jauh                                         | Pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan sumberdaya yang sustainable                         | Koordinasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan pusat dan provinsi                                                       | Kualitas sumberdaya perairan semakin terdegradasi.                                                                                                      |
| 5. Produktifitas nelayan                                                                   | Belum optimal                   | Hasil tangkapan nelayan dan sarana penangkapan                                                           | Penyediaan armada perikanan                                                                  | Dukungan pembiayaan pemprov dan pemerintah pusat<br>Akses Permodalan bagi nelayan<br>Sistem tengkulak yang masih berkembang | produktifitas para nelayan belum optimal                                                                                                                |
| 6. Sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kegiatan usaha perikanan | Kurang                          | Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan          | Penyediaan sarana dan prasaran perikanan budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan | Dukungan pembiayaan baik pemprov maupun kementerian kelautan dan perikanan                                                  | Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kurangnya kegiatan usaha perikanan                                                |
| 7. Praktek Penangkapan Ikan Destruktif                                                     | Tinggi                          | Kerusakan Terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan                                                     | Pengawasan dan pembinaan, mata pencaharian alternatif                                        | Koordinasi lintas sektor, pengawasan bersama                                                                                | Praktek destruktive fishing masih berlangsung.                                                                                                          |
| 8. Konflik Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan                                   | Tinggi/meningkat                | Tingkat konflik dipesisir dan laut                                                                       | Regulasi pemanfaatan ruang yang kuat                                                         | Kerjasama dan dukungan lintas sektor                                                                                        | Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi                                                                               |
| 9. Pengawasan, partisipasi masyarakat dan koordinasi                                       | Belum Optimal                   | Intensitas pengawasan dan tingkat partisipasi masyarakat                                                 | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan pemberdayaan masyarakat                        | Kerjasama lintas sektor                                                                                                     | Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum optimal, disertai rendahnya partisipasi masyarakat serta masih lemahnya kerjasama lintas sektor |
| 10. Infrastruktur pada sentra – sentra produksi                                            | kurang                          | Sarana Jalan, listrik, sanitasi dan infrastruktur pendukung lain yang terdapat di sentra-sentra produksi | Penetapan wilayah sentra produksi perikanan berdasarkan potensi masing-masing wilayah        | Kerjasama lintas sektor (kimpraswil, Perindag dan Koperasi)                                                                 | Infrastruktur pada kawasan sentra-sentra produksi masih minim                                                                                           |

Berdasarkan tabel 2.2, terlihat bahwa aspek kajian yang terkait dengan sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan. Produktivitas nelayan hingga saat ini masih tergolong rendah, Saprasi produksi dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas serta belum adanya sapras pengawasan.

Sumber daya ikan yang berada di perairan perairan pantai cenderung mengalami penurunan populasi (*overfishing*). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas adalah degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara ilegal seperti penggunaan metode penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, listrik dan obat bius, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin.

Berdasarkan Isu-isu dan permasalahan yang sudah teridentifikasi maka tantangan dan peluang dalam menjalankan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Rencana Program Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) :

a. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih rendah.
- Terbatasnya Infrastruktur untuk mendukung kepastian usaha Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi Perikanan budidaya dan Tangkap.
- Teknologi Budidaya dan penangkapan yang diterapkan masih rendah
- Rendahnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha perikanan yang masih rendah.
- Penurunan produktivitas perairan.
- Teknologi budidaya yg diterapkan masih bersifat tradisional
- Pengolahan dan pemasaran produk belum dikembangkan dengan baik

b. Tantangan :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan kelompok
- Rendahnya kemampuan/kapasitas kelembagaan kelompok bagi masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
- Terbatasnya permodalan usaha
- Sarana dan prasarana produksi yang masih kurang
- Akses informasi bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih terbatas.

c. Peluang :

- Kegiatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan cukup tinggi
- Potensi komoditas cukup besar
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah
- Minat masyarakat yang bermukim di wil. pesisir & pulau-pulau kecil cukup besar dalam melakukan kegiatan bidang perikanan
- Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat cukup tinggi

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar usaha perikanan, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Program Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan:

a. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- SDM masyarakat Kelautan dan Perikanan masih rendah.
- Akses informasi bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar hasil perikanan masih terbatas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam operasional.
- Rendahnya penegakan peraturan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan

b. Tantangan :

- Aksesibilitas ke daerah pesisir dan pulau-pulau kecil masih sulit
- Partisipasi masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang kurang
- Tingkat pendidikan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang
- Kerjasama lintas sektoral
- Data base yang masih minim

c. Peluang :

- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
- Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

**2. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Sinergis**

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan banyak memiliki keterkaitan dengan pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut : Pemerintah, swasta dan masyarakat. Gambaran pelaku tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak lain.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku di bidang kelautan dan perikanan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas kelautan dan perikanan membuka peluang keterpaduan pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran. Kondisi keterpaduan antar pihak harus terus di perbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu terus di tingkatkan demikian pula hubungan pusat dan daerah, serta lembaga ekonomi mikro perlu diberdayakan.

### **3. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan kabupaten Muna Barat saat ini di hadapkan pada suatu dilema, bahwa disatu sisi diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang PAD di Kabupaten Muna Barat, namun disisi lain tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran tersebut sebagai konsekuensi menjadi daerah otonom, yang harus mampu membiayai segala kebutuhan daerah, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerapkan skala prioritas untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam peningkatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam rangka tindak lanjut perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024 adalah :

1. Bahwa mengingat bentang wilayah Kabupaten Muna Barat yang merupakan wilayah kepulauan dan daratan maka wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan hampir mencakup semua wilayah Kabupaten Muna Barat (sekitar 85%), maka diperlukan Program yang langsung dapat bersentuhan dengan usaha bidang kelautan dan perikanan. Dalam rangka pengukuran tingkat kinerja dan capaian Renstra SKPD, maka diperlukan kegiatan “Pemutakhiran Data Base Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja yakni adanya dokumen data statisik perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan dan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Data base ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan utama penyusunan perencanaan SKPD.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kabupaten Muna Barat, terutama dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan kegiatan “Penguatan Kapasitas Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan, program pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”. Kegiatan ini sangat diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, BLH, BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan serta lembaga non-pemerintah sesuai

## PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

---

dengan tupoksinya masing – masing, dalam rangka mempersiapkan kabupaten Muna Barat sebagai kabupaten kepulauan.

3. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya, guna mewujudkan target pertumbuhan produksi pada tahun 2022 yakni diperlukan kerja keras dan anggaran yang memadai untuk menstimulus dan mencapai target-target pertumbuhan tersebut.

Untuk mencegah/mengurangi kerusakan lebih lanjut pada ekosistem pesisir pantai serta *overfishing* perairan pantai, maka diperlukan stimulus untuk mendorong nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam rangka mengurangi laju degradasi ekosistem pesisir, khususnya mangrove dan terumbu karang diperlukan perlindungan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara teratur dan intensitas yang tinggi. Olehnya itu ditahun 2024 sangat diperlukan pendanaan untuk kebutuhan pengelolaan dan perlindungan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

---

Dalam perumusan program dan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2023 telah mempertimbangkan berbagai macam usulan para pemangku kepentingan dan berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan serta pengamatan saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Proses perumusan program/kegiatan telah dilakukan berdasarkan data-data yang di himpun melalui observasi dilapangan dan juga langsung melakukan diskusi dengan pelaku usaha perikanan budidaya, tangkap, pemasaran dan pengolahan hasil serta tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain rumusan program tersebut juga kami telah mengumpulkan isu-isu yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, terutama soal penurunan produktifitas perairan akibat rusaknya ekosistem penting pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan hasil observasi yang dikumpulkan, maka dilakukan penelaahan usulan program/kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat saat melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan yang di fasilitasi oleh BAPEDA Kabupaten Muna Barat. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya di bahas dan di kaji secara bersama-sama melalui pertemuan dengan seluruh kepala bidang dan staf lingkup dinas kelautan dan perikanan kabupaten muna barat. Dalam pertemuan ini membahas Rencana kerja SKPD tahun 2024 dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang telah di kumpulkan dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Untuk penyajian tentang penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat di lihat pada tabel 2.3.

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat.

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

| No | Program/Kegiatan                   | Lokasi          | Indikator Kinerja                             | Besaran/<br>Volume | Catatan |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1  | Pembuatan Tambak                   | Desa Lemoambo   | Luasan tambak yang tercetak                   | 10 Ha              |         |
| 2  | Pengembangan Tambak                | Desa Lakawoghe  | Luasan tambak yang tercetak                   | 10 Ha              |         |
| 3  | Pengadaan Perahu Nelayan           | Desa Maginti    | Jumlah Perahu Nelayan yang tersedia           | 80 Unit            |         |
| 4  | Pengadaan Bubu Rajungan            | Desa Bangko     | Jumlah Bubu Rajungan yang tersedia            | 5.000 Unit         |         |
| 5  | Pengadaan Jaring Ikan Dasar        | Desa Maginti    | Jumlah Jaring Ikan Dasar yang tersedia        | 150 Pis            |         |
| 6  | Pembuatan Jalan Nelayan            | Desa Masara     | Panjang jalan usaha yang terbangun            | 1.500 m            |         |
| 7  | Pengadaan Alat Tangkap Nelayan     | Desa Santiri    | Jumlah alat tangkap yang tersedia             | 50 Unit            |         |
| 8  | Pengadaan Mesin/Perahu             | Desa Bero       | Jumlah mesin/perahu yang tersedia             | 20 Unit            |         |
| 9  | Pembuatan Tambak Air Tawar         | Desa Waulai     | Luasan tambak yang tercetak                   | 2 Ha               |         |
| 10 | Pengadaan Jaring Kepiting Rajungan | Gala            | Jumlah Jaring rajungan yang tersedia          | 1 Paket            |         |
| 11 | Pengadaan Jaring Kepiting          | Desa Maginti    | Jumlah Jaring rajungan yang tersedia          | 200 Pis            |         |
| 12 | Bantuan Alat Tangkap               | Desa Kangkunawe | Jumlah alat tangkap yang tersedia             | 200 KK             |         |
| 13 | Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar     | Wuna            | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia     | 10.000 Ekor        |         |
| 14 | Pengadaan Bubu Ikan                | Desa Maginti    | Jumlah bubu ikan yang tersedia                | 100 Unit           |         |
| 15 | Pengadaan Bubu Kepiting            | Desa Maginti    | Jumlah bubu kepiting yang tersedia            | 300 Unit           |         |
| 16 | Pengadaan Bibit Rumput Laut        | Desa Kangkunawe | Jumlah bibit rumput laut yang tersedia        | 100 KK             |         |
| 17 | Pengadaan Alat Pancing Rawai       | Desa Waukuni    | Jumlah alat pancing rawai yang tersedia       | 1 Paket            |         |
| 18 | Pengadaan Jaring Ikan Rajungan     | Desa Bangko     | Jumlah Jaring rajungan yang tersedia          | 2.000 Pis          |         |
| 19 | Pengadaan Mesin Katinting          | Desa Maginti    | Jumlah mesin katintin yang tersedia           | 80 Unit            |         |
| 20 | Pengadaan Perahu Fiber             | Desa Kangkunawe | Jumlah perahu fiber yang tersedia             | 100 KK             |         |
| 21 | Pengadaan Perahu Fiber             | Desa Bangko     | Jumlah perahu fiber yang tersedia             | 70 Unit            |         |
| 22 | Bantuan Rumpon                     | Desa Kangkunawe | Jumlah rumpon yang tersedia                   | 1 Paket            |         |
| 23 | Bantuan Bibit Ikan Air Tawar       | Desa Barakkah   | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia     | 10.000 Ekor        |         |
| 24 | Pengadaan Bibit Ikan Mas           | Desa Abadi Jaya | Jumlah bibit Ikan Mas yang tersedia           | 1 Klp              |         |
| 25 | Saprodi Tambak                     | Desa Barakkah   | Jumlah dan jenis saprodi tambak yang tersedia | 174 Ha             |         |
| 26 | Bantuan Benih Udang                | Desa Barakkah   | Jumlah benur udang yang tersedia              | 174 Ha             |         |
| 27 | Bantuan Bibit Ikan Air Tawar       | Desa Barakkah   | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia     | 174 Ha             |         |
| 28 | Bantuan Mesin Katinting            | Desa Bangko     | Jumlah mesin katintin yang tersedia           | 30 Unit            |         |
| 29 | Pengadaan Sero                     | Desa Maginti    | Jumlah sero yang tersedia                     | 2 Unit             |         |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|    |                                                      |                    |                                                            |             |  |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 30 | Alat Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan | Desa Bero          | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 50 Unit     |  |
| 31 | Pengadaan Mesin/Perahu                               | Desa Tiga          | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 32 | Pengadaan Bibit Rumput Laut                          | Desa Maginti       | Jumlah bibit rumput laut yang tersedia                     | 500 kg      |  |
| 33 | Pengadaan Mesin/Perahu                               | Desa Santigi       | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 34 | Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan      | Desa Tiga          | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 50 Unit     |  |
| 35 | Pengadaan Mesin/Perahu                               | Desa Santiri       | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 36 | Pengadaan Mesin/Perahu                               | Desa Tasipi        | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 37 | Pengadaan Mesin/Perahu                               | Desa Mandike       | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 38 | Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan      | Desa Santigi       | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 50 Unit     |  |
| 39 | Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan      | Desa Tasipi        | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 50 Unit     |  |
| 40 | Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan      | Desa Mandike       | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 50 Unit     |  |
| 41 | Bantuan Sero                                         | Desa Latawe        | Jumlah sero yang tersedia                                  | 10 Unit     |  |
| 42 | Bibit Ikan Air Tawar (Nila)                          | Desa Katangana     | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia                  | 1.000 Ekor  |  |
| 43 | Pengadaan Mesin/Perahu                               |                    | Jumlah mesin perahu yang tersedia                          | 20 Unit     |  |
| 44 | Bantuan Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan        | Desa Latawe        | Jumlah Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan yang tersedia | 10 unit     |  |
| 45 | Alat Tangkap Nelayan/Bubu Rajungan                   | Desa Tondasi       | Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia                | 1.000 Buah  |  |
| 46 | Bantuan Bibit Ikan Air Tawar                         | Desa Sangia Tiworo | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia                  | 6 Klp       |  |
| 47 | Pembuatan Kolam Air Tawar                            | Desa Kasimpa Jaya  | Luas kolam air tawar yang tercetak                         | 2 Ha        |  |
| 48 | Bantuan Bibit Ikan Air Tawar                         | Desa Kasimpa Jaya  | Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia                  | 10.000 Ekor |  |

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

**Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Muna Barat beserta Pendanaannya**

---

Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terdapat pengurangan anggaran yang diakibatkan oleh defisit anggaran pada APBD Kabupaten Muna Barat. Untuk itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengurangi defisit anggaran tersebut. Disamping itu perubahan kegiatan juga terjadi dalam rangka mendukung program prioritas Bupati Muna Barat.

Jumlah anggaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan pada perubahan anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 6.694.070.216,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Muna Barat (PAD, DAU, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah). Rumusan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sesuai dengan rancangan akhir Perubahan RKPD 2024 yaitu meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Secara lengkap rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada Renja Perubahan Tahun 2024 disajikan seperti dalam Tabel 3.1 berikut ini :

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                              | Anggaran Sebelum Perubahan Tahun 2024 |                        |                      |             | Rencana Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2024 |                        |                      |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                 |                                                               |                                                                                | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp)  | Sumber Dana | Lokasi                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp)  | Sumber Dana |
| (1)             | (2)                                                           | (3)                                                                            | (4)                                   | (5)                    | (6)                  | (7)         | (8)                                           | (9)                    | (10)                 | (11)        |
|                 | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                           |                                                                                |                                       |                        | <b>9.258.447.808</b> |             |                                               |                        | <b>6.694.070.216</b> |             |
| 3 25 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>           | <b>% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b> |                                       |                        | <b>3.204.222.083</b> |             |                                               |                        | <b>3.018.352.691</b> |             |
| 3 25 01 2.01    | <b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | Nilai AKIP                                                                     |                                       |                        | <b>22.660.000</b>    |             |                                               |                        | <b>22.660.000</b>    |             |
| 3 25 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia                             | Kab. Muna Barat                       | 1 dok                  | 4.800.000            | DAU         | Kab. Muna Barat                               | 1 dok                  | 4.800.000            | DAU         |
| 3 25 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Kab. Muna Barat                       | 1 laporan              | 17.860.000           | DAU         | Kab. Muna Barat                               | 1 lap                  | 17.860.000           | DAU         |
| 3 25 01 2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 | <b>Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu</b>           |                                       |                        | <b>2.552.061.086</b> |             |                                               |                        | <b>2.193.398.694</b> |             |
| 3 25 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                              | Kab. Muna Barat                       | 25 orang               | 2.551.611.086        | DAU         | Kab. Muna Barat                               | 24 orang               | 2.186.148.694        | DAU         |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |    |    |      |    |                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |              |                |     |                              |                |     |
|---|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|------------------------------|----------------|-----|
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 |                 |              |                |     | 1 dok                        | 6.800.000      | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 225.000        | DAU | 1 laporan                    | 225.000        | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 225.000        | DAU | 1 laporan                    | 225.000        | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                                                                             |                 | <b>1 Dok</b> | <b>450.000</b> |     |                              | <b>450.000</b> |     |
| 3 | 25 | 01 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                          | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 150.000        | DAU | Kab. Muna Barat<br>1 laporan | 150.000        | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada                                                               | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 150.000        | DAU | Kab. Muna Barat<br>1 laporan | 150.000        | DAU |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|                 |                                                                   |                                                                                  |                 |              |                    |     |                 |              |                    |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|-----------------|--------------|--------------------|-----|
|                 |                                                                   | SKPD                                                                             |                 |              |                    |     |                 |              |                    |     |
| 3 25 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 150.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 1 laporan    | 150.000            | DAU |
| 3 25 01 2.04    | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> |                 | <b>1 Dok</b> | <b>10.000.000</b>  |     |                 | <b>1 Dok</b> | <b>-</b>           |     |
| 3 25 01 2.04 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah          | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah    | Kab. Muna Barat | 1 Laporan    | 10.000.000         | DAU |                 |              |                    |     |
| 3 25 01 2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  |                 | <b>1 Dok</b> | <b>525.000</b>     |     |                 | <b>1 Dok</b> | <b>525.000</b>     |     |
| 3 25 01 2.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     | Kab. Muna Barat | 1 Dok        | 525.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 1 Dok        | 525.000            | DAU |
| 3 25 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         |                 | <b>1 Dok</b> | <b>415.533.000</b> |     |                 | <b>1 Dok</b> | <b>568.526.000</b> |     |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |    |    |      |    |                                                                  |                                                                                        |                 |    |         |             |     |                 |    |         |             |     |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|-------------|-----|-----------------|----|---------|-------------|-----|
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia             | Kab. Muna Barat | 1  | paket   | 1.999.000   | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | paket   | 5.240.000   | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | Kab. Muna Barat |    |         |             |     |                 | 1  | paket   | 5.000.000   |     |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Kab. Muna Barat | 1  | Dok     | 16.920.000  | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | Dok     | 24.420.000  | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Kab. Muna Barat | 1  | paket   | 23.000.000  | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | paket   | 33.095.000  | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab. Muna Barat | 50 | laporan | 373.614.000 | DAU | Kab. Muna Barat | 50 | laporan | 500.771.000 | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>          |                 | 1  | Dok     | 121.999.997 |     |                 | 1  | Dok     | 124.999.997 |     |
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Muna Barat | 1  | laporan | 7.999.997   | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | laporan | 10.999.997  | DAU |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                        |                 |    |         |                      |     |                 |    |         |                      |     |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|----------------------|-----|-----------------|----|---------|----------------------|-----|
| 3 | 25 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kab. Muna Barat | 1  | laporan | 114.000.000          | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | laporan | 114.000.000          | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |                 | 1  | Dok     | <b>80.993.000</b>    |     |                 | 1  | Dok     | <b>107.793.000</b>   |     |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Muna Barat | 18 | unit    | 68.993.000           |     | Kab. Muna Barat | 18 | paket   | 84.793.000           | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Kab. Muna Barat | 10 | unit    | 5.000.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 10 | unit    | 8.000.000            | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kab. Muna Barat | 1  | unit    | 5.000.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | unit    | 13.000.000           | DAU |
| 3 | 25 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Kab. Muna Barat | 1  | unit    | 2.000.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 1  | paket   | 2.000.000            | DAU |
| 3 | 25 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                        | <b>% peningkatan produksi perikanan tangkap</b>                                                        |                 | 5  | %       | <b>3.950.297.518</b> |     |                 | 5  | %       | <b>2.506.902.518</b> |     |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                 |            |                      |     |                 |            |                      |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----|-----------------|------------|----------------------|-----|
| 3 25 03 2.01    | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> |                 | 1 dok      | <b>64.950.000</b>    |     |                 | 1 dok      | <b>15.000.000</b>    |     |
| 3 25 03 2.01 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                  | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                           | Kab. Muna Barat | 1 dok      | 64.950.000           | DAU | Kab. Muna Barat | 1 dok      | 15.000.000           | DAU |
| 3 25 03 2.02    | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   | <b>Jumlah Nelayan yang meningkat Kapasitasnya</b>                                                                                                                              |                 |            | <b>3.885.347.518</b> |     |                 |            | <b>2.491.902.518</b> |     |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                            | Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya                                                                                                                               | Kab. Muna Barat | 100 orang  | 3.869.347.518        | DAU | Kab. Muna Barat | 60 orang   | 2.475.902.518        | DAU |
| 3 25 03 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                                    | Kab. Muna Barat | 2 kelompok | 16.000.000           | DAU | Kab. Muna Barat | 2 kelompok | 16.000.000           | DAU |
| 3 25 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                   | <b>% peningkatan produksi perikanan budidaya</b>                                                                                                                               |                 | 5 %        | <b>1.705.928.207</b> |     |                 | 5 %        | <b>1.011.214.007</b> |     |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |           |                      |     |                 |           |                      |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----|-----------------|-----------|----------------------|-----|
| 3 25 04 2.04    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                                                              | <b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>                                                                   |                 | 1 dok     | <b>1.705.928.207</b> |     |                 | 1 dok     | <b>1.011.214.007</b> |     |
| 3 25 04 2.04 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      | Kab. Muna Barat | 1 dok     | 6.000.000            | DAU | Kab. Muna Barat | 1 dok     | 6.000.000            | DAU |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Kab. Muna Barat | 1 unit    | 418.484.700          | DAU | Kab. Muna Barat | 3 unit    | 363.045.000          | DAU |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Kab. Muna Barat | 7 unit    | 1.271.443.507        | DAU | Kab. Muna Barat | 8 unit    | 632.169.007          | DAU |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                               | Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                | Kab. Muna Barat | 30 orang  | 10.000.000           | DAU | Kab. Muna Barat | 30 orang  | 10.000.000           | DAU |
|                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |           |                      |     |                 |           |                      |     |
| 3 25 05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                        | <b>persentase usaha perikanan yang sesuai aturan</b>                                                                   |                 | 100 %     | <b>4.000.000</b>     |     |                 | 100 %     | <b>4.000.000</b>     |     |
| 3 25 05 2.01    | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</b> |                 | 1 Dokumen | <b>4.000.000</b>     |     |                 | 1 Dokumen | <b>4.000.000</b>     |     |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|   |    |    |      |    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                 |   |             |             |     |                 |   |             |             |     |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-----|-----------------|---|-------------|-------------|-----|
| 3 | 25 | 05 | 2.01 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota             | Kab. Muna Barat | 1 | Doku<br>men | 2.000.000   | DAU | Kab. Muna Barat | 1 | Doku<br>men | 2.000.000   | DAU |
| 3 | 25 | 05 | 2.01 | 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kab. Muna Barat | 1 | Doku<br>men | 2.000.000   | DAU | Kab. Muna Barat | 1 | Doku<br>men | 2.000.000   | DAU |
| 3 | 25 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                         | <b>% peningkatan produksi olahan hasil perikanan</b>                                                                                                                                 |                 | 3 | %           | 394.000.000 |     |                 | 3 | %           | 153.601.000 |     |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 |    | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>                                                                | Jumlah Dokumen                                                                                                                                                                       |                 | 5 | dok         | 15.000.000  |     |                 | 5 | dok         | 15.000.000  |     |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                          | Kab. Muna Barat | 1 | dok         | 15.000.000  | DAU | Kab. Muna Barat | 1 | dok         | 15.000.000  | DAU |

**PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

|                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |             |     |                 |                |            |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|-----------------|----------------|------------|-----|
| 3 25 06 2.02    | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>           | Jumlah Dokumen Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                                                                      |                 | 1 dok           | 26.500.000  |     |                 | 1 dok          | 39.700.000 |     |
| 3 25 06 2.02 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Kab. Muna Barat | 4 unit usaha    | 26.500.000  | DAU | Kab. Muna Barat | 4 unit usaha   | 39.700.000 | DAU |
| 3 25 06 2.03    | <b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>             | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                                                 |                 | 1 Dok           | 352.500.000 |     |                 | 1 Dok          | 98.901.000 |     |
| 3 25 06 2.03 02 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                               | Kab. Muna Barat | 10 pelaku usaha | 352.500.000 | DAU | Kab. Muna Barat | 2 pelaku usaha | 98.901.000 | DAU |

## **PENUTUP**

---

*Bab ini menguraikan tentang Penutup dari Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2024*

---

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2024, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Renja DKP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang/bagian yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dalam menyusun program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing bagian tersebut.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan adalah kegiatan-kegiatan prioritas yang belum mendapat pagu tambahan anggaran pada tahap RKPD Perubahan, diprioritaskan untuk dianggarkan dari pergeseran internal atau dianggarkan ulang pada Rencana Kerja Tahun 2025. Agar kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin dari Perangkat Daerah dan stakeholders sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi, diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Perubahan Renja DKP ini, dapat memenuhi target Renstra Tahun 2023 - 2026. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan, dikarenakan adanya penyesuaian dengan ketersediaan anggaran, kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja

## PERUBAHAN RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024

---

Akhirnya dengan dukungan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan dapat mendorong tercapainya Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

*Laworo, November 2024*

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Muna Barat



**SUKARTI LYKRA, S.Pd., MM**

Pembina Tk. I, Gol.IV/b

NIP. 19731008 200312 1 002